

Rabu (30/8/2017).

Kendati demikian, Harry menjelaskan untuk bisa mengambil sisa 41,64 persen divestasi saham PTFI, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah

masuk dalam konsorsium khusus yang memang berminat untuk membeli saham PTFI.

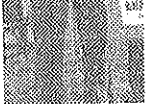
"Jumat (25/8) lalu sudah ada pembicaraan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jadi ada kerja sama pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemda untuk gunakan BUMN dan BUMD," katanya.

Meski belum ada keputusan pasti, Harry mengaku ingin proses pengambil-

nyak daripada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten," ujarnya.

Ada pun terkait perhitungan harga divestasi sahamnya, Harry mengatakan nantinya akan ada penunjukan valuator independen untuk melakukan kajian. "Nanti dari Freeport akan menunjuk, dari pemerintah juga akan menunjuk. Akhir minggu ini mudah-mudahan skemanya sudah jelas," pungkasnya.

■ Arbi



PENERIMA
dr Ali Mahs

Jakarta,
Umum I
dagang K
dr. Ali M
mengeasl
butuh ka
yang loya
rah Putih
dalam me
lim penja
Indonesia
Lima Pi
Lima Ind

"APK
gerinya R
Indones
perputar
dalam m
ingan p
bebas du
Ali dalam

Sesuai
PT MI
Barat
Perny
Irawa
23 Ag
moda
menj
dan
sebes
Jika
deng
Huku
RI, JL
dalam

PEKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

5. Tentang Hak Tanggungan dengan ini PT. BPR Nusanantara Bona Pasogit, selaku pemegang Sertifikat Hak Tanggungan No. 1 KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAJU dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan Hak Tanggungan terhadap jaminan Debitur

di atasnya seluas 79 m2 dengan bukti kepemilikan di Blok P5-30 atau Bojong Cede, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Sertoran Jaminan Lelang Rp.45.000.000,-.

acara secara tertulis tanpa kehadiran peserta (email) yang diakses pada alamat domain www.nbp19.com. Tata cara mengikuti lelang email dapat dilihat pada "Prosedur" dan "Panduan Penggunaan"

1. perseorangan maupun badan usaha. Calon peserta dapat mengaktifkan akun pada aplikasi e-Auction dan merekam dan mengunggah softcopy (scan) dokumen yang bersangkutan.

2. alamat domain diatas sejak pengumuman lelang pada Kamis, 14 September 2017 pukul 14.00 WIB

3. nyeterikan uang jaminan lelang sama dengan harga penawaran yang telah diterima KPKNL pada Rabu 13 September 2017 pukul 11.00 WIB ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing milik masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan transaksi yang valid.

4. hari ini. Penawaran lelang dapat diajukan melalui sebagaimana disebutkan pada angka 3.

5. harga pembelian dan bea lelang ditujukan ke rekening bank yang ditunjuk sejak pelaksanaan tidak melampaui kewajiban pembayaran sesuai disetorkan ke Kas Negara.

6. (as what is).

7. dan atau Pejabat Lelang dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat atau/keberatan dalam bentuk apapun kepada

8. dan persyaratan lelang dapat menghubungi Kantor Bona Pasogit 19 di nomor telepon

Depok, 31 Agustus 2017



PT. BPR Nusanantara Bona Pasogit 19



PT GARDA TUJUH BUANA Tbk.
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Garda Tujuh Buana Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Gedung Menara Hijau Lt. 5 Suite 501A, Jl. MT. Haryono Kav. 33, Pancoran, Jakarta 12770, Indonesia bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") di Jakarta pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2017.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan RUPS akan diiklankan pada hari Jumat, tanggal 15 September 2017 sekurang-kurangnya di 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

Yang berhak menghadiri/mewakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, 14 September 2017. Setiap usul pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam agenda RUPST jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain usul tersebut harus diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal panggilan untuk RUPST.

Jakarta, 31 Agustus 2017

Direksi Perseroan